

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/1381/KEP/413.013/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap kebijakan, rencana dan program Rencana Detail Tata Ruang Kota yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

- Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1).
- 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Kabupaten Lamongan 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;
 - c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;

e. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan

f. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 6 Agustus 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

SERRETARIAI DALRAN TO LOCKO NURSIYANTO
RING 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1381/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 6 AGUSTUS 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

| No. | Kedudukan dalam Kelompok Kerja | Nama | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembina | Fadheli, S.H., M.M. | Bupati Lamongan |
| 2. | Pengarah | Yuhronur Effendi, M.B.A. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan |
| 3. | Penanggungjawab | Drs. M. Nalikan, M.M. | Asisten Tata Praja Kabupaten Lamongan |
| 4. | Ketua I | Ir. Suyatmoko, M.M.A. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan |
| | Ketua II | Drs. Moch. Wahyudi, M.M. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan |
| 5. | Wakil Ketua I | Moch. Faiz Junaidi, S.P., M.P. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan |
| | Wakil Ketua II | A. Farikh, S.H., M.M. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan |
| 6. | Sekretaris I | Agus Cahyono, S.E., M.Si. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan |
| | Sekretaris II | Drs. Ismunawan, M.M. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan |
| Ang | gota Pelaksana Kelompo | ok Kerja | |
| 1. | Ketua | Yayuk Sri Rahayu, S.T., M.T. | Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan |
| 2. | Sekretaris | Ir. Adhim Trisetyaningtyas, M.M. | Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan |
| 3. | Anggota | 1. Eddy Sutrisno, S.E., M.M. | Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan |
| | | 2. Suep, S.E., M.M. | Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan |
| | | 3. Fadheli P | Camat Paciran |
| | | 4. Ir. Basuki, M.M. | Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | 5. Matali | Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan |
| | | 6. M. Amada Kurniawan, S.T. | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan |
| | | 7. Rikky Rosita, S.T. | Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan |
| | | 8. Inganatul Muhimmah, S.T., M.T. | Kepala Seksi Amdal dan Perizinan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan |
| | | 9. Luluk Zumiathin A, S.E. | Kepala Seksi Pelayanan Perizinan III pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan |
| | | 10. Istiqomariyah | Kepala Seksi Usaha Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan |
| | | 11. Adhitya Putra P.U., S.T. | Kepala Seksi Pembangunan Utilitas Jalan dan Jembatan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan |
| | | 12. Saikhu Rohman, ST | Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan |
| | | 13. Yanuar Rahman, S.P. | Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortilkultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan |
| | | 14. Untari Dewi Kurniati, S.H., M.M. | Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan |
| | | 15. Agus Edi S | Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan |
| | | 16. Abd. Qodir S.Kep., Ns. | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan |
| | | 17. Pramono Widodo, S.Pd.MM | Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan |
| | | 18. Ratna Kumala Dewi, S.Pt., M.M.G., M.Eng. | Kepala Seksi Metode dan Informasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-------------------------|--|
| | | 19. Okta Vidianti, S.T. | Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan |
|] | | 20. H. Anas W. | Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Lamongan |
| | | 21. Nur Salim | Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Lamongan |

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

KEPAKA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

JOKO NURSIYANTO